

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemilihan umum secara umum lahir dari konsepsi dan gagasan besar demokrasi yang berarti merujuk kepada John Locke dan Rousseau, keterjaminan kebebasan, keadilan dan kesetaraan bagi individu dalam segala bidang. Pemilu di Indonesia sendiri dilaksanakan berkala yaitu 5 tahun sekali. Namun pada tahun 2019 yang lalu dilaksanakan pemilu serentak dengan memilih presiden dengan lembaga legislatif dengan secara bersamaan. Pemilu 2019 sendiri diatur berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-11/2013 tentang pemilu serentak dengan tujuan untuk meminimalisir biaya peserta pemilu dan hal lainnya.¹

Untuk memperoleh kemenangan di dalam pemilu tersebut, tentu dibutuhkan sebuah koalisi partai politik di dalamnya. Dalam ilmu politik, secara garis besar koalisi dikelompokkan atas dua kelompok. Pertama, *policy blind coalition*, yaitu koalisi yang tidak didasarkan atas pertimbangan kebijakan, tetapi untuk memaksimalkan kekuasaan (*office seeking*). Kedua, *policy-based coalitions*, yaitu koalisi berdasarkan pada preferensi tujuan kebijakan yang hendak direalisasikan (*policy seeking*).² Menurut Lili Romli, koalisi sendiri dibentuk dengan alasan

¹ Jurnal Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik oleh Ratna Sholihah. <https://ejournal2.undip.ac.id>. diakses pada 23 Februari 2021 pukul 18:52

² Lili Romli, 2017 *Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi*, Politica Vol. 8 No. 2, hal. 96-118.

seperti untuk memenangkan pemilu, untuk menjalankan roda pemerintahan dan perumusan kebijakan.³

Pada pemilu tahun 2019 sendiri terdapat 2 koalisi besar di Indonesia. Koalisi pertama yaitu di pihak pendukung Joko Widodo dengan sebutan Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan di pihak Prabowo Subianto dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP). Jika merujuk kepada apa pandangan Lili Rolo di atas, pembentukan masing-masing koalisi tentu bermaksud untuk memenangkan pemilu. Jika menang mereka akan membentuk dan menjalankan pemerintahan serta membangun harmonisasi dalam pembuatan kebijakan parlemen. Koalisi Indonesia Kerja sendiri berisi partai pendukung pemerintahan yaitu PDI-Perjuangan, PKB, PPP, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, PKPI, dan PSI. Sementara di pihak Koalisi Merah Putih atau oposisi berisi Partai Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat. Dengan melihat pola koalisi yang hadir dalam pemilu 2019, persaingan partai-partai besar sangat ketat dan sangat menarik untuk dilihat karena dapat mempengaruhi orientasi pemilih serta secara langsung dapat mendongkrak suara partai mereka.

Di Sumatera Barat sendiri, hal ini terbukti. Pada pemilihan presiden di Sumatera Barat Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno berhasil menjadi pemenang dengan 2.488.733 suara (85,95%) dan pasangan Joko Widodo- K.H Maaruf Amin hanya mendapatkan 407.761 suara (14,05%) jumlah yang sangat jauh perbedaannya.⁴ Dengan melihat hasil yang begitu mencolok untuk kemenangan

³ Lili Romli, 2017. *Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik pada Era Reformasi*, Politica Vol. 8 No. 2, hal. 96-118.

⁴ Rekap Suara di Sumbar. <https://news.detik.com/>. Diakses pada 30 Juli 2022 pukul 20.32

pasangan prabowo-sandi tentu akan berimbas kepada suara calon-calon legislatif dari partai koalisi pendukung mereka yaitu Partai Gerindra dan PKS, khususnya di Kota Padang. Kota Padang sendiri, Partai Gerindra mengumpulkan jumlah suara terbanyak dengan 96.748 suara dan PKS dengan 77.687 suara.⁵

Melihat hal ini, Partai Gerindra dan PKS menjadi partai yang mendapatkan salah satu kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Dengan melihat hasil perolehan suara Pileg 2019 di Sumatera Barat sendiri, kedua partai ini juga mendapatkan perolehan suara tertinggi secara bergantian di 8 daerah pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Barat. Total Gerindra mendapatkan 14 Kursi sementara PKS mendapatkan 10 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024⁶



UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.1
Kursi DPRD Provinsi Sumatera Barat Gerindra dan PKS

Nama Partai	2019	Persentase Kursi di DPRD Provinsi
Gerindra	14	9,1 %
PKS	10	6,5%

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA
Sumber: Data Sekunder KPU Provinsi Sumatera Barat

Dominasi Koalisi Merah Putih terutama Partai Gerindra dan PKS di DPRD Provinsi Sumatera Barat sangat amat terasa. Gerindra dan PKS sangat menjadi partai yang berhasil mendistribusikan kader-kader mereka dengan baik di DPRD

⁵ Perolehan suara pada pileg tahun 2019 di Kota Padang. www.sumbar.kpu.go.id. Diakses Pada 30 Juli pukul 20.13

⁶ Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat No 55/PL01.9/KPU/13/KPU-Prov/VIII/2019 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Parpol Peserta Pemilu Anggota DPRD Prov Sumatera Barat Tahun 2019.

Provinsi Sumatera Barat. Hal ini tentu membuat sebuah bentuk kerja sama yang baik antara Gerindra dengan partai lainnya. Dengan adanya 14 kursi yang didapatkan oleh Partai Gerindra dan 10 Kursi dari PKS mereka berhasil menempatkan kader mereka dalam posisi strategis di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Tercatat di dalam struktur Alat Kelengkapan Dewan (AKD) 2019-2024 DPRD Provinsi Sumatera Barat, Partai Gerindra berhasil menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan menempatkan kadernya yaitu Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat. Nama lainnya yaitu Muchlis Yusuf Abit sebagai Ketua Komisi V DPRD Provinsi Sumatera Barat. Sementara dari Partai PKS, berhasil menempatkan H. Irsyad Syafar sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024.⁷

Namun koalisi yang dibangun ini tentu tidak selamanya berjalan dengan baik. Terjadi sebuah permasalahan internal bahkan eksternal yang membuat koalisi ini dengan mudahnya akan terpecah belah. Dalam internal, kedua partai ini tidak sejalan lagi satu dengan lainnya. Dalam eksternalnya, keputusan Prabowo Subianto untuk menerima tawaran dari Joko Widodo untuk menjadi Menteri Pertahanan dalam Kabinet Jokowi sangat berdampak besar dalam keselarasan koalisi yang ia bangun.



⁷ Profil DPRD Provinsi Sumatera Barat diakses lewat <https://dprd.sumbarprov.go.id/home/profil Dewan> diakses pada 12 November, 2022 Pukul 22.02

Dalam penelitian Khansa Rana Syafira berjudul Disharmonisasi antara kepala daerah dan dalam penyelenggaraan pemerintahan periode 2016-2021 di Kabupaten Jember, Jawa Timur dijelaskan bahwa disharmonisasi antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Jember secara menyeluruh dilandaskan atas komunikasi politik yang tidak baik antara kepala daerah dengan DPRD Kabupaten Jember, Jawa Timur yang akhirnya menjadi sebuah konflik antara kepala daerah tersebut dengan legislatif daerah tersebut.⁸

Dalam penelitian Baitur Rohman, M. Syahri, Nurul Zuria⁹ disharmonisasi adalah kondisi retaknya suatu peran sosial dalam suatu kelompok. Fenomena disharmonisasi jika dilihat dari pengertian di atas adalah suatu fakta tentang kondisi dalam suatu kelompok yang tidak selaras dan menimbulkan keretakan atau perpecahan, sedangkan partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki persamaan kehendak, cita-cita dan ideologi tertentu dan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan kebijakan dan program-program yang mereka telah buat. Keberadaan partai politik akan membuat masyarakat merasa andil dalam menjalankan sistem pemerintahan

Sementara Huntington¹⁰ dalam *American Politics: The Promise of Disharmony* menjelaskan disharmoni politik terjadi karena kesenjangan antara janji dan kinerja

⁸ Khansa Rana Syafira, 2021, *Disharmonisasi Relasi Kepala Daerah Dan DPRD Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Periode 2016-2021 Di Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Vol 1 No 2.

⁹ Baitur Rohman, M. Syahri, Nurul Zuriah, 2019, Fenomena Disharmonisasi Partai Politik Berbasis Islam Pada Pemilu 2019, *Jurnal Civic Hukum*, Vol 4 No 2 hal 91-102.

¹⁰ Huntington, Samuel P. 1981, *American Politics: The Promise of Disharmony*, United States of America, The Belknap Press of Harvard University, hal 1-13.

yang menciptakan sebuah ketidakharmonisan yang melekat pada waktu nyata. Menurut Andre Beteille, tatanan eksistensial dan normatif dalam sebuah politik itu konsisten satu sama lainnya dan mereka dalam pusaran konflik. Dalam ketidaksetaraan sistem disharmoni tidak lagi diinvestasikan dengan legitimasi meskipun mereka terus ada dalam masyarakat.¹¹

Penelitian ini dilatarbelakangi karena sudah selangkahnya partai politik yang berkuasa di Indonesia terutama di Sumatera Barat dapat menjaga sebuah keharmonisan koalisi yang mereka bangun bukan akhirnya membuat sebuah konflik yang akhirnya akan menjadikan sebuah disharmoni dalam tubuh pemerintahan terutama pemerintahan legislatif di Sumatera Barat. Masyarakat Sumatera Barat mengharapkan agar partai penguasa dengan partai pemenang dapat harmonis hingga akhir periode mereka menjabat. Tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak dapat terpenuhi.

Dalam penelitian ini peneliti berusaha menjelaskan penyebab terjadinya disharmonisasi antara Partai Gerindra dengan Partai PKS. Penelitian ini menjadi baru sebab jika dilihat pada penelitian yang telah ada sebelumnya isu yang dikaji hanya sebatas kepala daerah saja bukan legislatornya seperti yang akan peneliti teliti.

Pada beberapa penelitian sebelumnya memperlihatkan disharmonisasi yang terjadi tidak atas kepentingan melainkan kepala daerah dengan legislator tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tidak banyak penelitian ilmiah yang mengkaji

¹¹ Huntington, Samuel P. 1981, *American Politics: The Promise of Disharmony*, United States of America, The Belknap Press of Harvard University, hal 1-13.

disharmonisasi politik yang terjadi di tubuh legislatif yang melibatkan dua partai. Di Indonesia khususnya di Sumatera Barat koalisi yang dibangun saat pemilihan presiden tidak berjalan harmonis pasca pemilihan presiden telah usai.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lili Romli mendapatkan hasil bahwa kuatnya konflik internal partai-partai politik memperlihatkan betapa lemahnya konditas elite di tubuh partai-partai politik. Kenapa munculnya konflik internal pada partai-partai politik juga menandakan betapa minimnya pelaksanaan di tubuh partai dalam mengatasi konflik untuk menuju konsensus. Dalam penelitian ini menggunakan teori konflik dan koalisi sehingga didapatkan hasil bahwa kecenderungan konflik internal pada partai politik era reformasi bukan disebabkan karena perbedaan visi- misi, platform dan ideologi partai, tetapi cenderung disebabkan oleh pragmatisme atas pilihan koalisi partai politik dalam mendukung calon presiden dan wakil presiden dan/atau pemerintahan serta kepentingan kekuasaan.

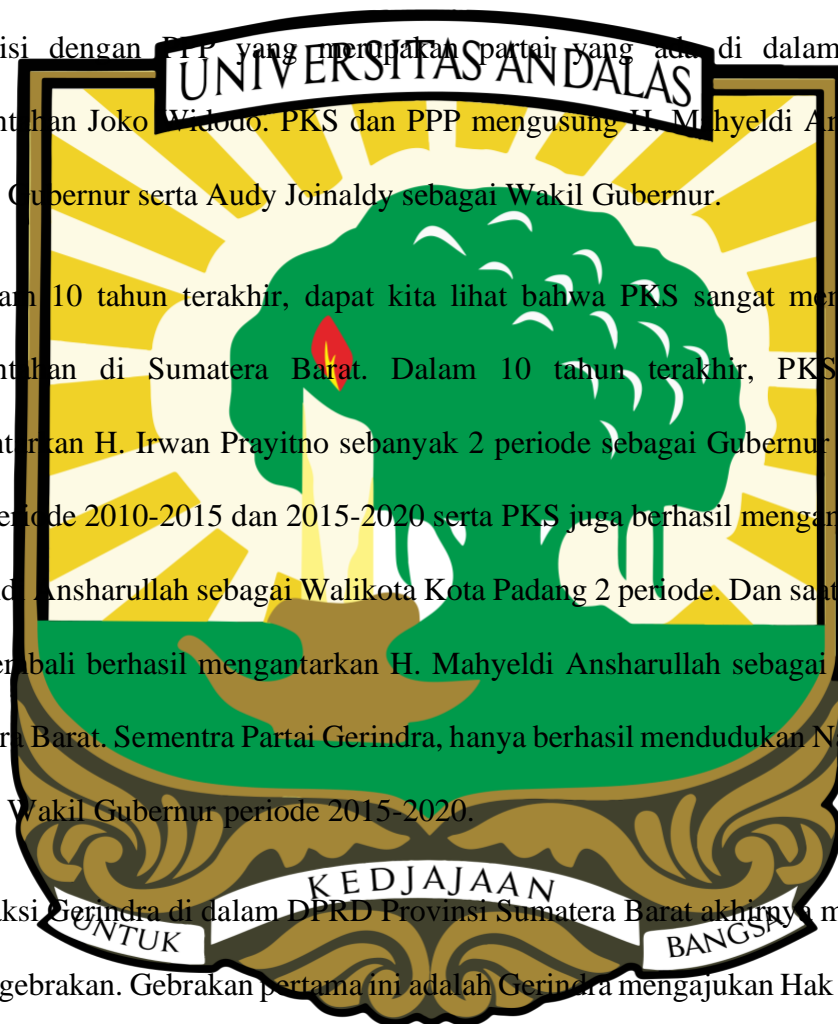
Fenomena disharmonisasi jika dilihat dari pengertian di atas adalah suatu fakta tentang kondisi dalam suatu kelompok yang tidak selaras dan menimbulkan keretakan atau perpecahan, sedangkan partai politik adalah suatu organisasi yang disusun secara rapi dan stabil yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki persamaan kehendak, cita-cita dan ideologi tertentu dan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum untuk mewujudkan kebijakan dan program program yang mereka telah buat.¹²

¹² Gunarsa, S.D.2004, Psikologi Praktis: anak, remaja, dan keluarga, Gunung Mulia, Jakarta hlm 34

Disharmonisasi ini merebak ke publik ketika Pemilihan Gubernur tahun 2020 dimulai. Gerindra yang sangat mendominasi memilih untuk menjadi Partai pengusung tunggal tanpa koalisi dengan mengusung Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Indra Catri sebagai Wakil Gubernur. Posisi Nasrul Abit sedikit diuntungkan dengan mengemban status sebagai petahana. PKS sendiri akhirnya memilih berkoalisi dengan PPP yang merupakan partai yang ada di dalam pusaran pemerintahan Joko Widodo. PKS dan PPP mengusung H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur serta Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur.

Dalam 10 tahun terakhir, dapat kita lihat bahwa PKS sangat mendominasi pemerintahan di Sumatera Barat. Dalam 10 tahun terakhir, PKS berhasil mengantarkan H. Irwan Prayitno sebanyak 2 periode sebagai Gubernur Sumatera Barat periode 2010-2015 dan 2015-2020 serta PKS juga berhasil mengantarkan H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Kota Padang 2 periode. Dan saat ini Partai PKS kembali berhasil mengantarkan H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sementara Partai Gerindra, hanya berhasil mendudukkan Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur periode 2015-2020.

Fraksi Gerindra di dalam DPRD Provinsi Sumatera Barat akhirnya melakukan sebuah gebrakan. Gebrakan pertama ini adalah Gerindra mengajukan Hak Interplasi kepada Gubernur saat itu H. Irwan Prayitno atas landasan sering melakukan perjalanan dinas keluar negeri. Setelah hak interplasi ini, pasca pergantian gubernur, H. Mahyeldi Ansharullah mendapatkan sebuah hak angket yang didukung oleh F-



Gerindra. Hak Angket kepada Gubernur Sumatera Barat H Mahyeldi Ansharullah bersama 2 fraksi lainnya yaitu Demokrat dan PKB¹³

Meskipun bukan dari Fraksi Gerindra yang mengemukakan hak angket tersebut, akan tetapi dukungan Gerindra terhadap hak angket tersebut menjadi bentuk nyata disharmonisasi antara Gerindra dan PKS ini sendiri. Hak angket tersebut didasari atas kasus surat Gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah yang meminta sumbangan untuk memungut pada pihak pemerintah, swasta dan lainnya perihal Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan. Kemudian, surat imbauan tentang Pemanfaatan Ruang Promosi Dalam Rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat Outlook.¹⁴

Disharmonisasi ini terlihat jelas pada tahun 2022. Seperti yang kita ketahui, dalam 2,5 Tahun AKD (Alat Kelengkapan Dewan) akan mengalami rotasi. Pada sidang paripurna DPRD Sumatera Barat 7 Maret 2022 ditetapkan AKD (Alat Kelengkapan Dewan) Rotasi 2022-2024. Awalnya usulan fraksi Gerindra menempatkan semua anggota fraksinya pada satu komisi yaitu komis IV yang adalah komisi pembangunan dengan tujuan untuk mengawal proyek-proyek pembangunan di Sumatera Barat tidak dapat terwujud dan anggota fraksi Gerindra dipecah ke beberapa komisi.¹⁵

¹³ <https://news.detik.com/berita/d-5723094/33-anggota-dprd-ajukan-hak-angket-soal-surat-minta-sumbangan-gubernur-sumbar> diakses pada 12 November 2022.04

¹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5701665/demokrat-usul-hak-angket-terhadap-gubernur-sumbar-soal-surat-minta-sumbangan> diakses pada 12 November 2022.04

¹⁵ <https://www.arunala.com/berita/2602/meski-alot-penetapan-akd-di-dprd-sumbar-akhirnya-disahkan.html> diakses pada 12 November 2022 pukul 22.10

Alat kelengkapan dewan¹⁶ sendiri adalah sebuah jantung didalam tubuh DPRD Provinsi itu sendiri. Melihat situasi politik yang dihadapi oleh PKS dan Gerindra, disharmonisasi ini akhirnya menyebabkan lahirnya sebuah konflik politik. Menurut Dahrendorf, konsep sentral dari teori konflik sendiri adalah pewenang dan posisi. Dengan demikian masyarakat disebut oleh Dahrendorf sebagai : persekutuan yang terkoordinasi secara paksa (*imperatively coordinated associations*)¹⁷

Ada tiga macam konflik politik. Pertama, konflik politik karena memperebutkan jabatan-jabatan politik atau kekuasaan. Kedua, konflik politik karena kebijakan-kebijakan politik. Ketiga, konflik politik muncul karena perbedaan pandangan terhadap lembaga-lembaga politik.¹⁸ Melihat ketiga hal ini, Gerindra dan PKS sama-sama sedang terlibat konflik politik baik di luar dan di dalam DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan pemaparan yang telah peneliti sampaikan di atas terkait dengan terjadinya disharmonisasi antara Partai Gerindra dengan Partai PKS melatarbelakangi peneliti untuk menganalisis penyebab disharmonisasi Partai Gerindra dengan Partai PKS di DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan judul penelitian “Disharmonisasi Partai Gerindra Dengan Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Provinsi Sumatera Barat”

¹⁶ Alat kelengkapan dewan sendiri mempunyai fungsi pokok yaitu mewakili DPRD secara simbolis dalam kegiatan berhubungan dengan lembaga eksekutif, lembaga tinggi negara yang lain serta memimpin jalannya administratif kelembagaan secara umum termasuk memimpin rapat dan menetapkan sanksi atau rehabilitasi dengan komposisi 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua.

¹⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Diterjemahkan oleh Alimandan (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal. 26.

¹⁸ Maswadi Rauf, 2000. *Konsensus dan Konflik Politik: Sebuah Penjajagan Teoritis*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Dominasi parlemen yang didapat oleh Gerindra dan PKS tidak lepas dari kemenangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Sumatera Barat. Selain hasil pilpres yang sangat mencolok, hasil pemilihan legislatif yang didapat oleh PKS dan Gerindra juga sangat amat jauh mencolok dari partai lain.

UNIVERSITAS ANDALAS

Tabel 1.2

Persentase Perolehan Kenaikan Kursi Gerindra dan PKS di DPRD Sumatera Barat

Nama Partai	2014	2019	Persentase Kenaikan Kursi
Gerindra	8	14	83%
PKS	7	10	80%

Sumber : Data Sekunder KPU Provinsi Sumatera Barat

UNTUK BANGSA

Pada periode 2019-2024 Gerindra meraih 14 kursi dengan persentase kenaikan sebesar 83% dan PKS mendapatkan 10 kursi yang mendapatkan kenaikan persentase sebanyak 80%. Karena pada Pileg periode 2014-2019 Gerindra hanya mendapatkan 8 kursi, kemudian PKS dengan 7 kursi. Perolehan kursi Gerindra dan PKS pada Pileg 2019 dinilai efektif dengan adanya Prabowo effect yang terjadi pada Pilpres tahun ini di Kota Padang

Di pusat sendiri, bergabungnya Prabowo Subianto dalam tubuh pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pertahanan Republik Indonesia menjadi bentuk pecahnya koalisi yang Partai Gerindra bangun dengan Partai PKS. Selang beberapa waktu, Sandiaga Uno (Cawapres Prabowo Subianto) bergabung dengan

pemerintahan Joko Widodo sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sementara Partai PKS tetap di jalur oposisi pemerintahan.

Seperti yang sudah dijelaskan penelitian dalam latar belakang masalah, terjadi sebuah disharmonisasi antara Partai Gerindra dengan Partai PKS. Di DPRD Provinsi Sumatera Barat sendiri dominasi Gerindra dapat dilihat dari Gerindra yang berhasil menempatkan kader-kader terbaiknya dalam posisi strategis yang ada di dalam parlemen. Dalam AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPRD Provinsi Sumatera Barat periode 2019-2024.

Dalam penyusunan jajaran Ketua dan AKD Tahun 2019-2022 tahap awal sebelum rotasi, F-Gerindra berhasil menempatkan Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Lalu Muchlis Yusuf Abit sebagai Ketua Komisi V dan Evi Yanti Rajo Budiman sebagai Wakil Ketua Komisi I. Sementara PKS hanya menempatkan H. Irsyad Syafar, LC.M.Ed sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.¹⁹

Pada tahun 2019 yang lalu, F-Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat melakukan sebuah bentuk *check and balance* dalam politik. Fraksi Gerindra menginisiasi hak interplasi kepada Gubernur Sumatera Barat pada saat itu H. Irwan Prayitno atas landasan perjalanan dinas ke luar negeri yang berlebihan.²⁰ Hak interplasi ini sendiri didukung langsung oleh ketua DPD Gerindra Sumatera Barat H. Andre Rosiade yang juga merupakan anggota DPR-RI Fraksi Gerindra. Hak Interplasi sendiri adalah hak DPR untuk meminta keterangan kepada Pemerintah

¹⁹ Buku Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

²⁰ <https://regional.kompas.com/read/2019/12/19/17433791/gubernur-sumbar-sering-ke-luar-negeri-gerindra-siapkan-hak-interpelasi?page=all> diakses pada 16 Desember 2022 Pukul 21.05

mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.²¹

Setelah mulai meredanya hak interplasi yang dikemukakan oleh F-Gerindra di DPRD Provinsi Sumatera Barat terjadi pemilu serentak 2019. Dengan hasil, Gerindra memenangkan pemilu legislatif di Sumatera Barat. Maka dari itu, AKD (Alat Kelengkapan Dewan) DPRD Provinsi 2019-2024 pun terbentuk. Dengan susunan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

Nama AKD	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Jumlah Anggota
Pimpinan DPRD		<u>Irsyad Syafar</u> (PKS/Sumbar 5)		5
Badan Musyawarah	<u>Supardi</u> (Gerindra)	<u>Suwirpen Suib</u> (Demokrat/Sumbar 1)		
Badan Anggaran		<u>Indra Dt. Rajo Lelo</u> (PAN/Sumbar 1)		
Badan Kehormatan	<u>Irzal Ilyas</u> (Demokrat)	<u>Dody Delvi</u> (PAN/Sumbar 5)	Sekretaris DPRD (ex-officio)	5
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	<u>Budiman Dt. Malano</u> <u>Garang</u> (PKS)	<u>Afrizal</u> (Golkar/Sumbar 1)		
Komisi I Bidang Pemerintahan	<u>Syamsul Bahri</u> (F-PDIP-PKB)	<u>Evi Yandri Rajo</u> <u>Budiman</u> (Gerindra)	<u>H. M Nurmas</u> (Demokrat)	9
Komisi II Bidang Ekonomi	<u>Arkadius</u> <u>Datuak Intan</u> <u>Bano</u> (Demokrat)	<u>Muhayatul</u> (PAN)	<u>Nurkhalis Datuak</u> <u>Bijo Dirajo</u> (Gerindra)	11

²¹ UU No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Komisi III Bidang Keuangan	H.Afrizal (Golkar)	Ali Tanjung (Demokrat)	Ismunandi Sofyan (Gerindra)	12
Komisi IV Bidang Pembangunan	Muhammad Ikhbal (PAN)	Mesra (Gerindra)	Lazuardi Erman (Golkar)	15
Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat	Muchlis Yusuf Abit (Gerindra)	Donizar (PDIP-PKB)	Syahrul Furqan (PAN)	15

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Dalam penyusunan jajaran Ketua dan AKD Tahun 2019-2022 tahun awal sebelum petasi, F-Gerindra berhasil menempatkan Supardi sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Lalu Muchlis Yusuf Abit sebagai Ketua Komisi V dan Evi Yaner Rajo Budiman sebagai Wakil Ketua Komisi I. Sementara PKS hanya menempatkan H. Irsyad Syafar, L.C.M.Ed sebagai Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat.²²

Diskriminasi ini merebak ke publik ketika Pemilihan Gubernur tahun 2020 dimulai. Gerindra yang sangat mendominasi memilih untuk menjadi Partai pengusung tunggal tanpa koalisi dengan mengusung Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Indra Catri sebagai Wakil Gubernur. Posisi Nasrul Abit sedikit diuntungkan dengan mengemban status sebagai petahana. PKS sendiri akhirnya memilih berkoalisi dengan PPP yang merupakan partai yang ada dalam pusaran pemerintahan Joko Widodo. PKS dan PPP mengusung H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur serta Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur.

Dalam 10 tahun terakhir, kita sama-sama mengetahui bahwa PKS sangat mendominasi pemerintahan Sumatera Barat yang ada. Dalam 10 tahun terakhir,

²² Buku Profil Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat 2019-2024

Partai PKS berhasil mendudukkan H. Irwan Prayitno sebanyak 2 periode sebagai Gubernur Sumatera Barat yaitu pada periode 2010-2015 dan 2015-2020 dan H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Walikota Kota Padang 2 periode. Dan saat ini Partai PKS kembali berhasil menajdikan H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur Sumatera Barat. Sementara Partai Gerindra hanya berhasil mengantarkan H. Nasrul Abit sebagai Wakil Gubernur periode 2015-2020.

Pada pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020, Gerindra dan PKS pecah koalisi. Gerindra menjadi Partai pengusung tunggal tanpa koalisi dengan mengusung Nasrul Abit sebagai Gubernur dan Indra Catri sebagai Wakil Gubernur. PKS sendiri akhirnya memilih berkoalisi dengan PPP yang merupakan partai yang ada di dalam pusran pemerintahan Joko Widodo. PKS dan PPP mengusung H. Mahyeldi Ansharullah sebagai Gubernur serta Audy Joinaldy sebagai Wakil Gubernur.

PKS kembali memenangkan pemilihan Gubernur Sumatera Barat untuk ketiga kalinya dalam 15 tahun terakhir. Pasangan H. Mahyeldi Ansharullah dan Audy Joinaldy (PKS-PPP) berhasil memenangkan pemilu dengan 32,43% disusul dengan pasangan H. Nasrul Abit dan Dr. Indra Catri (Gerindra) dengan 30,30%²³. Ini menjadikan PKS kembali menjadi partai pemenang di Sumatera Barat dan Gerindra menjadi partai penguasa di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Pasca pergantian gubernur Sumatera Barat yang terpilih yaitu H. Mahyeldi Ansharullah, F-Gerindra kembali mendukung adanya hak angket yang dilayangkan

²³ JDIH KPU Provinsi Sumatera Barat

kepada H. Mahyeldi Ansharullah. Hak angket ini sendiri dilandaskan atas kasus surat gubernur Sumatera Barat H. Mahyeldi Ansharullah yang meminta sumbangan untuk memungut pada pihak pemerintah, swasta dan lainnya perihal Partisipasi dan Kontribusi Penerbitan Buku Profil Sumatera Barat Provinsi Madani, Unggul dan Berkelanjutan. Kemudian, surat imbauan tentang Pemanfaatan Ruang Promosi Dalam Rangka Penerbitan Buku Sumatera Barat Outlook.²⁴

Hak angket sendiri menurut UU No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah hak DPR untuk melaksanakan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan benegara yang diduga bertentangan dengan peraturan-peraturan perundang-undangan itu sendiri.²⁵ Meskipun pada akhirnya hak angket ini sendiri kanda dikarenakan 9 pengusul dari dua fraksi tarik diri dan mencabut hak angket itu sendiri akhirnya hak angket tersebut kandas.

Pada tahun 2022, Terjadi rotasi Alat Kelengkapan Dewan Provinsi Sumatera Barat. Pada usulan awal AKD, F-Gerindra meminta agar usulan kadernya didistribusikan ke Komisi IV (Pembangunan). Usulan ini dilandaskan atas ingin mengawal pembangunan yang dilakukan di Sumatera Barat. Namun ini tidak dapat dikabulkan oleh rapat paripurna tersebut. Ketua F-Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat, Hidayat mengatakan kalau fraksinya tidak ikut dalam pemilihan

²⁴ <https://news.detik.com/berita/d-5701665/demokrat-usul-hak-angket-terhadap-gubernur-sumbar-soal-surat-minta-sumbangan> diakses pada 12 November 22.04

²⁵ UU No 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pimpinan AKD, dan tetap berada pada posisi anggota saja. Pasca mundurnya F-Gerindra dari pemilihan pimpinan AKD, AKD Rotasi 2022-2024 terbentuk dan dijelaskan di tabel berikut:

Tabel 1.4
Alat Kelengkapan Dewan DPRD Provinsi Sumatera Barat 2022-2024

Nama AKD	Ketua	Wakil Ketua	Sekretaris	Jumlah Anggota
Pimpinan DPRD	<u>Irsyad Syafar</u> (PKS/Sumbar 5)	<u>Suwirpen Suib</u> (Demokrat/Sumbar 1)	<u>Indra Dt. Rajo Lelo</u> (PAN/Sumbar 1)	5
Badan Musyawarah	<u>Supardi</u> (Gerindra/Sumbar 5)	<u>Syafril Huda F-PPP-Nasdem</u> (Sumbar 5)	Sekretaris DPRD (ex-officio)	5
Badan Anggaran	<u>Musli M Nur</u> (F-PAN)	<u>Afrizal</u> (Golkar/Sumbar 1)		5
Badan Pembentukan Peraturan Daerah	<u>Budiman Dt. Malano Garang</u> (PKS/Sumbar 6)	<u>Sawal Dt. Putih</u> (PPP/Sumbar 4)	<u>Maigus Nasir</u> (PAN/Sumbar 1)	9
Komisi I Bidang Pemerintahan	<u>Ali Tanjung</u> (Demokrat/Sumbar 8)	<u>Rahmat Saleh</u> (PKS/Sumbar 1)	<u>Irwan Afriadi</u> (Nasdem/Sumbar 7)	12
Komisi II Bidang Ekonomi	<u>Zulkenedi Said</u> (Golkar/Sumbar 4)	<u>Bukhari Dt. Tuo</u> (PAN/Sumbar 6)	<u>Suharjono</u> (Demokrat/Sumbar 4)	15
Komisi III Bidang Keuangan	<u>Nela Abdika</u> (PKS/Sumbar 8)	<u>Arkadius Dt. Intan Bano</u> (Demokrat/Sumbar 6)		11

Komisi V Bidang Kesejahteraan Rakyat	Daswanto (<u>PAN</u> /Sumbar 6)	Aida (<u>Demokrat</u> /Sumba r 5)	Hardinalis Kobal (<u>Golkar</u> /Sumbar 15 7)
--	-------------------------------------	--	--

Sumber: diolah dari berbagai sumber

Setelah rotasi AKD tahun 2022-2024, banyak sekali perubahan. Evi Yandri Rajo Budiman yang berada pada Komisi I berpindah ke Komisi IV dan Muchlis Yusuf Ali dipindahkan ke Komisi II. Sementara P- PKS berniat mendistribusikan kadernya dalam posisi-posisi strategis kembali. Ini menjadi bentuk sebuah disharmonisasi dengan adanya konflik politik kepentingan serta dengan adanya koalisi yang lemah antara Gerindra dengan PKS di daerah.

Dari penjelasan di atas tentu menghadirkan sebuah konflik politik yang menyebabkan Partai Gerindra dengan PKS terlibat konflik. Menurut Dahrendorf sendiri terdapat 2 golongan yang terlibat konflik yaitu kelompok semu (quasi group) dan kelompok kepentingan (interest group). Kelompok semu merupakan kumpulan dari para pemegang kekuasaan atau jabatan dengan kepentingan yang sama yang terbentuk karena munculnya kelompok kepentingan. Sedangkan kelompok kepentingan terbentuk dari kelompok semu yang lebih luas. Kelompok kepentingan ini mempunyai struktur, organisasi, program, tujuan serta anggota yang jelas. Kelompok kepentingan inilah yang menjadi sumber nyata timbulnya konflik dalam masyarakat²⁶

Asumsi peneliti bahwa disharmonisasi yang terjadi antara Partai Gerindra dengan PKS didasari atas sebuah bentuk koalisi yang lemah dikarenakan koalisi yang dibangun hanya sebatas untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019

²⁶ George Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan...op. cit, h. 27.

bukan untuk koalisi jangka panjang dan hanya untuk pencarian jabatan semata. Dan pada akhirnya disharmonisasi politik antara Partai Gerindra dengan PKS ini menyebabkan sebuah konflik kepentingan antar masing-masing partai. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan peneliti adalah “Mengapa terjadi disharmonisasi antara Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera di

DPRD Provinsi Sumatera Barat?”

Pemilihan Partai Gerindra dengan Partai PKS sebagai objek penelitian disebabkan karena kedua partai ini adalah partai penguasa di Sumatera Barat serta kedua partai ini sering terlibat konflik baik konflik di pusat maupun di daerah terutama di Sumatera Barat.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka, tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan penyebab terjadinya disharmonisasi Gerindra dengan PKS di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Dalam segi akademis, menambahkan faktor-faktor disharmonisasi yang belum banyak dijelaskan oleh peneliti sebelumnya dan menjadi penelitian baru
2. Manfaat praktis, untuk menjadi bahan partai dalam membangun koalisi yang kuat sehingga akan terhindari dari disharmonisasi.

